
KONFLIK SOSIAL PETANI PADI AKIBAT MODERNISASI PERTANIAN DI DESA SIDORAHAYU KECAMATAN BELITANG KABUPATEN OKU TIMUR

Oleh

Nely Larasati¹, Rudy Kurniawan²

^{1,2}Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Universitas Sriwijawa

Email : ¹larasatinely04052004@gmail.com, ²rudykurniawan@fisip.unsri.ac.id

Article History:

Received: 13-05-2026

Revised: 22-05-2027

Accepted: 16-06-2026

Keywords:

Social Conflict,

Agricultural

Modernization,

Conflict Resolution

Abstract: *This study aims to identify the forms of social conflict and the conflict resolution efforts between landowners and farm laborers caused by agricultural modernization through the use of combine harvester machines (locally known as "kombet") in Sidorahayu Village, Belitang District, East Ogan Komering Ulu Regency. This research employs a qualitative method with a descriptive approach and a case study strategy. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving 15 informants, including landowners, farm laborers, village officials, and other relevant parties. The findings reveal that the use of combine harvester machines has fundamentally transformed the agricultural work system, particularly by reducing employment opportunities for farm laborers during the harvest season, thereby creating conflicting interests between landowners and farm laborers. The forms of conflict identified include protests and rejection, social tension and decreased social interaction, work strikes in rice planting, demands for wage increases, and economic anxiety among farm laborers. The study also found that conflict resolution was achieved through village deliberation (musyawarah), negotiation, and compromise, resulting in a new agreement on the division of harvest work (between combine harvesters and manual threshers) as well as adjustments to planting wages. This research confirms that social conflict resulting from agricultural modernization is not always destructive; rather, it can drive new structural adjustments that are more balanced when managed through dialogue and the participation of all parties involved.*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki banyak provinsi yang menjadi sentra produksi padi dan beras, salah satunya adalah Provinsi Sumatera Selatan. Di provinsi ini, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) merupakan kabupaten penghasil padi terbesar kedua setelah Kabupaten Banyuasin, dengan total produksi mencapai 716.876 ton pada tahun 2023 (BPS Sumsel, 2023). Kecamatan Belitang menjadi salah satu pusat produksi padi dengan luas lahan sawah mencapai 8.742 hektar sekaligus menyediakan tenaga kerja pertanian yang cukup besar.

Dalam praktik budidaya padi, Kecamatan Belitang pada awalnya menerapkan sistem pertanian tradisional yang berlangsung turun-temurun dengan mengandalkan tenaga manusia, pengetahuan lokal, dan alat-alat sederhana. Namun, seiring perkembangan zaman, pertanian mulai mengalami modernisasi melalui inovasi teknologi dan alat mesin pertanian modern. Modernisasi pertanian didefinisikan sebagai proses transformasi pertanian dari tradisional menuju pertanian yang lebih maju dengan mengadopsi berbagai alat mesin pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kesejahteraan petani (Yulianda *et al.*, 2022).

Salah satu bentuk modernisasi yang signifikan adalah penggunaan mesin combine harvester atau yang dikenal masyarakat sebagai mesin "kombet". Mesin ini merupakan alat pertanian multifungsi yang mampu memotong padi, merontokkan biji dari tangkainya, dan mengemas gabah ke dalam karung secara simultan (Umi *et al.*, 2024). Berbeda dengan mesin thresher sebelumnya yang masih membutuhkan banyak tenaga kerja buruh tani, mesin kombet hanya memerlukan dua hingga tiga orang operator. Penggunaan mesin kombet di Desa Sidorahayu dimulai pada panen pertama tahun 2023. Seharusnya modernisasi pertanian ini memberikan kemudahan dan meningkatkan produksi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa mesin kombet justru memicu konflik antara pemilik lahan dan buruh tani. Konflik ini muncul karena buruh tani menolak jika mesin kombet digunakan sepenuhnya karena dapat menghilangkan kesempatan kerja dan menurunkan pendapatan di musim panen. Bentuk penolakan yang ditunjukkan meliputi ketidakmauan menanam padi di lahan milik pemilik yang menggunakan mesin kombet, yang berdampak pada keterlambatan waktu tanam dan berpotensi mengganggu proses produksi padi.

Teori konflik sosial Ralf Dahrendorf digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Dahrendorf menegaskan bahwa konflik merupakan konsekuensi alami dari ketimpangan otoritas dalam struktur sosial masyarakat. Otoritas tidak melekat pada individu tetapi pada posisi sosial, yang menciptakan struktur sosial yang terdiri dari posisi yang memerintah (superordinate) dan posisi yang diperintah (subordinate), (Ramadani & Harianto, 2020). Dalam penelitian ini, pemilik lahan berada pada posisi superordinate karena memiliki otoritas menentukan penggunaan teknologi, sementara buruh tani berada pada posisi subordinate yang terdampak oleh keputusan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan strategi studi kasus (Creswell, 2019). Lokasi penelitian ditentukan secara purposive di Desa Sidorahayu, Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Informan dipilih dengan teknik purposive sampling sebanyak 15 orang, terdiri dari 10 informan utama (pemilik lahan dan buruh tani) dan 5 informan pendukung (perangkat desa, ketua RT, kepala dusun, pemilik mesin kombet, serta keluarga buruh tani). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi nonpartisipan, wawancara mendalam (terstruktur dan tidak terstruktur), serta dokumentasi. Keabsahan data dijamin dengan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan menggunakan teori konflik sosial Ralf Dahrendorf sebagai pisau analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Konflik Sosial Akibat Penggunaan Mesin Kombet

Penelitian ini mengidentifikasi lima bentuk konflik sosial yang muncul akibat penggunaan mesin kombet. Pertama, protes dan penolakan yang dilakukan buruh tani terhadap pemilik lahan yang menggunakan mesin kombet. Penolakan ini disampaikan baik secara langsung kepada pemilik lahan maupun melalui perangkat desa sebagai perantara. Buruh tani menyampaikan keberatan mereka karena merasa tidak dilibatkan lagi dalam kegiatan panen, padahal hubungan kerja dan kekeluargaan telah lama terjalin. Di sisi lain, sebagian pemilik lahan merespons dengan menyatakan bahwa lahan adalah hak milik pribadi sehingga mereka berhak menentukan sendiri cara pengelolaannya tanpa harus mempertimbangkan pendapat buruh tani. Sikap ini mencerminkan ketimpangan otoritas antara kedua kelompok. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Yudha et al., (2021) yang menjelaskan bahwa modernisasi pertanian dapat meningkatkan efisiensi produksi, tetapi juga memberikan dampak sosial berupa berkurangnya kesempatan kerja bagi buruh tani. Perubahan teknologi pertanian menyebabkan terjadinya pergeseran peran tenaga kerja manual sehingga memunculkan ketegangan antara kelompok yang memperoleh keuntungan dan kelompok yang terdampak.

Kedua, terjadinya ketegangan sosial dan menurunnya kualitas interaksi sosial antara pemilik lahan dan buruh tani. Sebelum adanya mesin kombet, hubungan antara kedua kelompok terjalin cukup dekat karena mereka saling membutuhkan dalam kegiatan pertanian. Hubungan ini tidak terbatas pada hubungan kerja, tetapi juga berkembang menjadi hubungan sosial dalam kehidupan sehari-hari seperti saling menyapa, menghadiri kegiatan masyarakat bersama, serta menjaga hubungan kekeluargaan. Namun, setelah mesin kombet diterapkan secara luas, hubungan sosial tersebut berubah menjadi renggang. Komunikasi menjadi terbatas, sapaan mulai hilang, bahkan muncul sindiran-sindiran di tengah masyarakat. Pemilik lahan merasakan bahwa buruh tani menjauhi mereka, sementara buruh tani mengaku merasa canggung dan malas untuk berinteraksi. Perkembangan teknologi pertanian membawa perubahan sosial masyarakat petani, termasuk berkurangnya interaksi sosial dan pergeseran nilai tradisional masyarakat pedesaan (Ajib & Habiburrahman, 2023).

Ketiga, tindakan mogok kerja yang dilakukan buruh tani dengan cara tidak bersedia menanam padi di lahan milik pemilik yang menggunakan mesin kombet untuk proses pemanenan. Tindakan ini merupakan bentuk resistensi paling nyata yang berdampak langsung pada proses produksi padi. Pemilik lahan mengalami kesulitan mendapatkan tenaga kerja untuk menanam padi, sehingga jadwal tanam terganggu dan produksi pertanian secara keseluruhan terhambat. Beberapa pemilik lahan bahkan terpaksa mencari buruh tanam dari luar desa untuk mengatasi masalah ini. Temuan ini berkaitan dengan penelitian Malida et al., (2023) yang menjelaskan bahwa penggunaan teknologi pertanian modern dapat menimbulkan ketimpangan sosial karena sebagian tenaga kerja pertanian kehilangan perannya dalam proses produksi.

Keempat, munculnya tuntutan kenaikan upah untuk kegiatan menanam padi di lahan yang dipanen menggunakan mesin kombet. Buruh tani mengajukan alasan teknis bahwa tanah sawah setelah dipanen dengan mesin kombet menjadi lebih berlumpur, becek, dan dalam (ambles), sehingga menyulitkan proses penanaman padi. Akibatnya, diperlukan

tenaga ekstra dan waktu yang lebih lama untuk menanam di lahan tersebut. Buruh tani menuntut kompensasi berupa kenaikan upah yang setara dengan beban kerja tambahan yang mereka tanggung. Fenomena ini menunjukkan bahwa modernisasi pertanian tidak hanya berkaitan dengan perubahan alat produksi, tetapi juga memengaruhi hubungan kerja dan sistem pembagian keuntungan antara pemilik lahan dan tenaga kerja pertanian (Pranadji & Simatupang, 2016).

Kelima, munculnya kecemasan ekonomi yang mendalam di kalangan buruh tani, terutama pada buruh tani perempuan dan janda. Kecemasan ini bukan sekadar perasaan tidak nyaman sesaat, melainkan tekanan psikologis dan sosial yang serius akibat hilangnya pendapatan pada musim panen. Para buruh tani mengandalkan pendapatan dari panen untuk membayar angsuran utang, memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial masyarakat seperti kondangan. Ketika mesin kombet digunakan secara masif, mereka kehilangan sumber pendapatan utama tersebut, sehingga muncul kebingungan bagaimana memenuhi kewajiban ekonomi dan sosial mereka. Kecemasan ini semakin berat dirasakan oleh buruh tani yang berstatus janda karena mereka tidak memiliki sumber pendapatan alternatif selain menjadi buruh tani. Penelitian Yudha et al., (2021) juga menunjukkan bahwa modernisasi pertanian dapat memberikan dampak negatif berupa menurunnya kebutuhan tenaga kerja manusia sehingga kelompok buruh tani mengalami kerentanan ekonomi.

Upaya Penyelesaian Konflik oleh Masyarakat

Konflik yang terjadi tidak dibiarkan berlarut-larut. Masyarakat Desa Sidorahayu bersama perangkat desa melakukan berbagai upaya penyelesaian. Upaya pertama adalah mediasi dan musyawarah desa yang melibatkan pemilik lahan, buruh tani, ketua RT, kepala dusun, dan kepala desa. Musyawarah dilaksanakan setelah musim panen dan menjelang musim tanam sebagai respons atas ketegangan yang terjadi. Musyawarah dipilih karena dianggap mampu menciptakan komunikasi yang lebih baik antara kedua belah pihak yang berkonflik, sekaligus mencerminkan masih kuatnya nilai kekeluargaan dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat setempat.

Kesepakatan utama yang dihasilkan dari musyawarah adalah pembagian struktur kerja panen. Mesin kombet tetap diperbolehkan digunakan, namun penggunaannya tidak dilakukan pada seluruh lahan pertanian. Sebagian lahan tetap dipanen secara manual menggunakan mesin thresher sehingga buruh tani masih dapat terlibat dalam proses panen. Pembagian ini dilakukan secara fleksibel dengan mempertimbangkan berbagai kondisi di lapangan. Lahan yang luas dibagi antara penggunaan mesin kombet dan panen manual. Lahan yang jauh dari jangkauan buruh tani atau memiliki kondisi padi yang kurang baik lebih diperbolehkan menggunakan mesin kombet. Sementara itu, lahan di tanah rawa harus dipanen secara manual agar tidak semakin ambles. Pembagian juga disesuaikan dengan musim panen, di mana pada musim panen besar buruh tani masih lebih banyak dilibatkan. Penelitian Nulhaqim et al., (2019) menunjukkan bahwa konflik pertanian dapat diselesaikan melalui proses musyawarah dan keterlibatan lembaga masyarakat sebagai pihak yang membantu mempertemukan kepentingan kelompok yang berbeda.

Kesepakatan kedua yang dihasilkan adalah penetapan kenaikan upah untuk kerja tanam padi di lahan yang dipanen menggunakan mesin kombet. Kenaikan upah ini merupakan bentuk kompensasi atas beban kerja tambahan yang dirasakan buruh tani akibat kondisi

tanah yang lebih sulit setelah dipanen dengan mesin kombet. Hal ini sesuai dengan penelitian Sabriani et al., (2024) yang menjelaskan bahwa penyelesaian konflik berbasis dialog dan kesepakatan mampu menciptakan hubungan sosial yang lebih stabil antar kelompok masyarakat. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa modernisasi pertanian tidak harus sepenuhnya mengabaikan nilai-nilai keadilan sosial. Buruh tani tetap merasakan penurunan kesempatan kerja di musim panen, namun mereka memperoleh kompensasi yang layak di musim tanam sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi dan kesulitan yang mereka hadapi

Analisis Teori Konflik Ralf Dahrendorf

Temuan penelitian ini memperkuat pemikiran Ralf Dahrendorf tentang konflik sosial. Pertama, konflik muncul akibat ketimpangan otoritas dalam struktur sosial pertanian. Pemilik lahan sebagai pemilik modal dan lahan berada pada posisi superordinate yang memiliki kekuasaan penuh menentukan teknologi panen, sementara buruh tani pada posisi subordinate yang hanya mengandalkan tenaga kerja justru kehilangan kesempatan kerja dan pendapatan. Sebagaimana dikemukakan Dahrendorf, otoritas yang tidak merata melahirkan perbedaan kepentingan yang menjadi dasar munculnya konflik sosial (Ramadani & Harianto, 2020).

Kedua, penelitian ini menunjukkan bahwa konflik tidak selalu bersifat negatif dan destruktif, tetapi dapat menjadi motor perubahan sosial. Melalui proses negosiasi, kompromi, dan musyawarah, masyarakat Desa Sidorahayu berhasil membentuk aturan baru yang lebih seimbang. Kesepakatan pembagian struktur kerja panen dan kenaikan upah tanam padi merupakan bentuk perubahan struktural yang lahir dari konflik. Hal ini sejalan dengan pandangan Dahrendorf bahwa konflik dapat menghasilkan penyesuaian baru dalam masyarakat melalui negosiasi dan kompromi antara kelompok yang memiliki kepentingan berbeda.

Ketiga, penelitian ini menemukan bahwa kelompok kepentingan (interest group) terbentuk di kedua sisi. Pemilik lahan yang diuntungkan oleh penggunaan mesin kombet cenderung mempertahankan status quo, sementara buruh tani yang dirugikan berjuang memperoleh keadilan. Proses pembentukan kelompok ini, sebagaimana dijelaskan Dahrendorf, melahirkan ketegangan yang ketika kelompok subordinat berubah menjadi kelompok konflik karena perbedaan kepentingan yang tidak terakomodasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan mesin kombet sebagai bentuk modernisasi pertanian di Desa Sidorahayu telah membawa perubahan pada sistem kerja dan hubungan sosial antara pemilik lahan dan buruh tani. Perubahan tersebut memunculkan konflik sosial berupa protes dan penolakan, menurunnya interaksi sosial, mogok kerja, tuntutan kenaikan upah, serta kecemasan ekonomi akibat berkurangnya kesempatan kerja buruh tani.

Konflik yang terjadi menunjukkan adanya perbedaan kepentingan dan ketimpangan otoritas antara pemilik lahan sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam menentukan penggunaan teknologi dengan buruh tani yang terdampak oleh perubahan tersebut. Namun, konflik tidak berakhir pada perpecahan sosial karena masyarakat mampu menyelesaikannya melalui musyawarah, negosiasi, dan kompromi yang menghasilkan kesepakatan pembagian penggunaan mesin kombet serta penyesuaian upah kerja.

Dengan demikian, modernisasi pertanian tidak hanya menghasilkan perubahan

teknologi, tetapi juga menciptakan perubahan sosial yang membutuhkan penyesuaian antar kelompok agar kepentingan pemilik lahan dan keberlangsungan pekerjaan buruh tani tetap dapat berjalan secara seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ajib, M., & Habiburrahman Aksa, A. (2023). Dampak Perkembangan Teknologi Pertanian Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Petani. *Al-I'timad: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 1(1), 19–41.
- [2] Creswell. (2019). *Research Desain Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Sugiyono* (4th ed.). Pustaka Belajar.
- [3] Malida, P., Muryani, & Faristiana, A. R. (2023). Dampak Perkembangan Teknologi Pertanian Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Kabupaten Madiun. *Student Scientific Creativity Journal (SSCJ)*, 1(4), 349–365. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v1i4.1650>
- [4] Nulhaqim, S. A., Fedryansyah, M., & Hidayat, E. N. (2019). Resolusi Konflik Agraria Berbasis Komunitas Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang. *Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1(2).
- [5] Pranadji, T., & Simatupang, P. (2016). Konsep Modernisasi dan Implikasinya terhadap Penelitian dan Pengembangan Pertanian. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 17(1), 1. <https://doi.org/10.21082/fae.v17n1.1999.1-13>
- [6] Ramadani, F. E., & Harianto, S. (2020). Konflik Sosial Perebutan Lahan Perkebunan. *Jurnal Kontruksi*. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511719899.021>
- [7] Sabriani, Faraadibba, A. A., & Yusman. (2024). Pola Penyelesaian Konflik: Studi Kasus Pemetaan Wilayah Adat Papua Pegunungan. *Jurnal Honai: Jurnal Pendidikan, Administrasi, Sains, Ekonomi, Dan Pemerintahan*, 4(1), 26–34. <https://doi.org/://doi.org/10.61578/honai.vol4.no1.art4> Jurnal
- [8] Umi, F., Febriana, S. A., Maulana, S. A. B., Sudarti, & Kendid, M. (2024). Analisis Konsep Mekanika Pada Mesin Combine Harvester Dalam Pemrosesan Padi Untuk Peningkatan Efisiensi Dan Kualitas Hasil Panen. *Jurnal Agro Indragiri*, 9(2), 78–84. <https://doi.org/10.32520/jai.v9i2.3204>
- [9] Yudha, E. P., Tedjalaksana, V., & Eka, K. (2021). *Dampak Modernisasi Terhadap Kesejahteraan Petani*. 62–67.
- [10] Yulianda, R., Tjoetra, A., & Mursyidin. (2022). Resiliensi Komunitas Petani Terhadap Konflik Sumber Daya Alam Akibat Perubahan Lanskap Ekologi Di Indonesia. *Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI 2022*, 1–3.